



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDRO HADI SUPENO**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)**
3. NHK : **428829**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 524.185.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/200 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 3730 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 52.220.000
3. Tanah Seluas 2975 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 41.650.000
4. Tanah Seluas 2710 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 37.940.000
5. Tanah Seluas 2610 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 36.540.000
6. Tanah Seluas 5145 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 72.030.000
7. Tanah Seluas 3465 m2 di GROBOGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 48.510.000
8. Tanah Seluas 1945 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 52.515.000
9. Tanah Seluas 6270 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp. 87.780.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 116.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA KHARISMA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	135.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	775.685.000
III. HUTANG	Rp.	77.033.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	698.652.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.